

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan membahas tentang teori yang akan mendasari dari penelitian ini. pembahasan ini akan menjadi paduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teori jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, retribusi obyek wisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 kabupaten.

2.1 Wisatawan

Wisatawan adalah faktor yang paling penting dalam berjalannya roda industri pariwisata. Pariwisata adalah salah satu sektor yang merupakan sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam menyumbangkan devisa Negara. Menurut Heriawan (2004) pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan hanya untuk bekerja atau mencari penghasilan ditempat tujuan.

Potensi wisata dapat menjadi peluang besar dalam pengembangan pariwisata Soebagyo (2012) , sehingga perlu memperhatikan peningkatan mutu pelayanan, kelestarian lingkungan wisata dan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pariwisata. Peningkatan pelayanan pariwisata dapat menjadikan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Selain itu mempersiapkan sarana dan prasana untuk mengunjungi suatu lokasi obyek wisata juga dapat menjadi perhatian serius, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang diperlukan

untuk mengunjungi suatu obyek wisata dapat menjadi pertimbangan bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata tersebut.

Wisatawan berasal dari kata “wisata” yang artinya adalah “perjalanan”. Secara lengkap wisatawan adapat diartikan sebagai orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain (Smith, dalam Kusumaningrum, 2009:16). Menurut Undang-Undang Keparawisataan Nomor 10 Tahun 2009, wisatawan adalah orang melakukan wisata. Berdasarkan wilayah dan ruang lingkup perjalanan, wisatawan dibagi menjadi wisatawan asing atau wisatawan dalam negeri atau domestik. Wisatawan asing adalah wisatawan yang menetap atau tinggal di suatu negara dan mengunjungi atau berwisata ke negara lain, bukan untuk tinggal menetap tetapi untuk melakukan perjalanan. Sedangkan wisatawan domestik adalah wisatawan yang berwisata di daerah yang merupakan daerah pada negara tempat ia tinggal.

Menurut Cooper dan Hall (2008) salah satu industri di dunia yang mengalami perkembangan paling pesat adalah industri pariwisata. Semakin meningkatnya penghasilan seseorang, berwisata akan menjadi alternatif gaya hidup dari seseorang tersebut. Pariwisata merupakan salah satu adri lime sektor yang menjadi program prioritas pembangunan dan penghasilan bagi Indonesia. Menurut Alghamdi (2007) faktor-faktor yang mendorong motivasi wisatawan untuk berwisata adalah sebagai berikut :

- 1) *Escape motives*, merupakan keinginan wisatawan untuk melepas atau melarikan diri dari lingkungan atas kejenuhan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari.

- 2) *Relaxation*, merupakan keinginan wisatawan untuk menyegarkan mental dan fisik.
- 3) *Play*, merupakan keinginan wisatawan untuk menikmati kegembiraan dengan cara menikmati permainan yang merupakan kemunculan kembali dari sifat anak-anak dan melepaskan diri dari urusan serius.
- 4) *Prestige*, merupakan keinginan wisatawan untuk menampilkan gengsi yang membuat suatu kelas dan gaya hidup yang mendorong peningkatan status atau derajat sosial
- 5) *Family and friend togetherness*, merupakan keinginan wisatawan untuk mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga atau teman yang melakukan wisata.
- 6) *Knowledge*, merupakan keinginan wisatawan untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang dipelajari di suatu daerah yang dikunjungi
- 7) *Self Fulfillment*, merupakan keinginan wisatawan untuk menemukan diri sendiri yang dapat ditemukan sewaktu menemukan daerah atau orang baru.
- 8) *Wish Fulfillment*, merupakan keinginan wisatawan untuk mewujudkan mimpi yang dicita-citakan dengan mengorbankan diri dengan cara menghemat supaya perjalanan wisata yang diimpikan dapat terwujud.

2.2 Obyek Wisata

Obyek wisata adalah daerah atau tujuan wisata yang memiliki daya tarik yang memiliki keunikan dan nilai yang tinggi sehingga orang-orang ingin berkunjung ke tempat tersebut. Menurut Mursid (2003), obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Obyek wisata yang akan dipilih wisatawan terdapat beragam jenis, dapat dilihat dari motivasi wisatawan untuk menunjang obyek wisata yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh wisatawan nantinya.

Pengembangan pariwisata merupakan usaha untuk memajukan obyek wisata supaya obyek wisata menjadi lebih baik dan menarik agar dapat menarik minat dan motivasi wisatawan untuk menunjang obyek wisata tersebut. Pengembangan obyek wisata suatu daerah tujuan wisata harus diperhitungkan dengan manfaat untuk masyarakat banyak. Dengan dilakukannya pengembangan obyek wisata maka pembangunan perekonomian di suatu daerah tersebut pun akan semakin meningkat.

Obyek wisata wajib memiliki aktivitas atau kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh pengunjung yang ingin berkunjung, Menurut obyek wisata merupakan hal yang berkaitan dengan obyek yang dapat menarik wisatawan berkunjung seperti bangunan sejarah, keadaan alam, kebudayaan, dan rekreasi modern. Aktivitas yang dapat dilakukan dapat secara fisik maupun non fisik. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan adalah *hiking*, melihat seni dan budaya, berbelanja, memandangi pemandangan alam, *camping*, *photography*.

2.3 Retribusi Obyek Wisata

Menurut Erly (2013) retribusi adalah pemungutan daerah atas pembayaran dari jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan. Retribusi obyek wisata merupakan biaya retribusi yang dipungut di lokasi parawisata atas penggunaan fasilitas parawisata dan pemberian izin untuk tempat berdagang oleh pemerintah kabupaten/kota. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi cukup besar pada pemerintah daerah. Salah satu retribusi yang cukup besar adalah tempat rekreasi obyek wisata. Walaupun retribusi obyek wisata bukan merupakan penerimaan retribusi utama, namun retribusi obyek wisata memiliki peran cukup penting bagi penyumbang penerimaan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan bayaran atas barang dan jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis.

Pajak dan retribusi merupakan sesuatu yang berbeda. Perbedaan yang paling mudah yaitu letak pada timbal balik langsung. Pajak tidak terdapat timbal balik langsung untuk pembayar pajak, namun retribusi terdapat timbal balik langsung dari penerimaan retribusi. Menurut UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan obyek wisata merupakan sumber pendapatan obyek wisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari obyek wisata tersebut.

Menurut ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut daerah
- 2) Terdapat prestasi yang diberikan daerah yang dapat ditunjuk dalam pungutan retribusi
- 3) Retribusi berikan kepada semua orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan daerah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Moningka et al. (2011) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285 tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan menyebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang teutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi yang bersifat wajib oleh individu atau badan yang memiliki sifat memaksa dan tak berbalas yang digunakan untuk mengelola pemerintahan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung (Siahaan, 175: 2013)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat untuk jasa layanan dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah untuk rakyat perorangan atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dikelompokkan menjadi :

- a. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan bisa dinikmati oleh pribadi atau badan
- b. Retribusi Jasa Usaha, merupakan retribusi atas jasa yang dipungut oleh pemerintahan daerah yang menganut prinsip komersial yang dapat disediakan oleh sektor usaha.
- c. Retribusi Perijinan Tertentu, merupakan retribusi atas suatu kegiatan pemerintah daerah atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk pemakaian ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas untuk kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang terlepas dari penguasaan umum dan dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah. Pendapatan yang mencakup laba atas penyertaan modal dari perusahaan milik daerah/BUMD. Peningkatan pendapatan asli daerah dalam menggerakkan ekonomi merupakan peran dari BUMD.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa daerah.

2.5 Studi Terkait

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutrisno (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel dan PDRB Terhadap Retribusi Parawisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah hotel dan PDRB terhadap retribusi objek parawisata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari

penelitian dengan menggunakan regresi data panel menunjukkan jumlah obyek wisata, jumlah hotel dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan retribusi di kabupaten/kota di Jawa Tengah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Daerah, Pengaruh Retribusi Parawisata Terhadap Pendapatan Asli (PAD) di Kabupaten Lawu Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemasukan retribusi parawisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lawu Utara. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Parawisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Parawisata di Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi obyek parawisata di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode model analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan data *time series* selama lima tahun (2007-2011) dan data *cross section* sebanyak 20 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel dan Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Obyek Parawisata.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sabrina (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Penerimaan Sektor Parawisata Sebagai Variabel Moderating Pada Dinas Parawisata Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan penerimaan sektor parawisata sebagai variabel Moderating. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis regresi linear berganda dengan model regresi Pure. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan penerimaan sektor parawisata sebagai variabel moderating.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alyani dan Siwi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Obyek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh tempat wisata dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan Panel Least Square untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah total tempat wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan jumlah wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.